

MERAWAT PERDAMAIAN MELALUI KEBIJAKAN TRANSPARANSI KINERJA ANTAR ANGGOTA ASEAN DALAM FORUM ADMM-PLUS

M. Harviend Gilang Perdana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
e-mail : gilang.saburai@gmail.com

Abstract

The conflict resolution was introduced at the First Meeting of the ASEAN Regional Forum (ARF) with the concept of Confidence Building Measures (CBMs) as a conflict resolutions efforts in the Southeast Asian region. ASEAN as an international regime in the Southeast Asia can provide an illustration of the effectiveness of this regime, ASEAN as an organization plays an active role in facilitating countries through the role of motivators and communicators in a problem. The defense aspect that ASEAN has in maintaining the stability of the Southeast Asian region is reflected in the intensity of regular meeting interactions for each member. Of all the characteristics that ASEAN possesses, awareness of strategic management within an organization in order to achieve effective goals. With the creation of intensive and transparent interactions, the CBMs concept can be implemented as an effective form of cooperation in efforts to manage conflict resolution in ASEAN. The concept of CBMs is supported by four factors as aspects that support the concept of CBMs that are running and implemented in every ASEAN country and organization as a form of conflict resolution in ASEAN.

Keywords: Peace, Conflict Resolution, ASEAN Regional Forum, CBMs

Abstrak

Proses resolusi konflik yang diperkenalkan dalam *First Meeting* ASEAN Regional Forum (ARF) dengan konsep *Confidence Building Measures* (CBMs) sebagai bentuk upaya resolusi konflik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai rezim internasional yang ada di kawasan Asia Tenggara dapat memberikan gambaran akan sebuah efektifitas dari rezim tersebut, ASEAN sebagai sebuah organisasi berperan aktif untuk memfasilitasi para negara melalui peran motivator dan komunikator dalam sebuah permasalahan. Aspek pertahanan yang dimiliki ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara tercermin dari intensitas interaksi pertemuan yang rutin bagi setiap anggota. Dari seluruh karakteristik yang dimiliki ASEAN, kesadaran akan pengelolaan strategi dalam sebuah organisasi demi tercapainya tujuan yang efektif. Dengan terciptanya interaksi yang intensif dan transparan menjadikan sebuah konsep CBMs dapat diimplementasikan sebagai bentuk kerjasama yang efektif dalam upaya pengelolaan resolusi konflik di ASEAN. Konsep CBMs ditopang oleh empat faktor pendukung sebagai aspek yang mendukung konsep CBMs berjalan dan diimplementasikan di setiap negara dan organisasi ASEAN sebagai bentuk resolusi konflik di ASEAN.

Kata kunci: perdamaian, resolusi konflik, ASEAN, CBMs

PENDAHULUAN

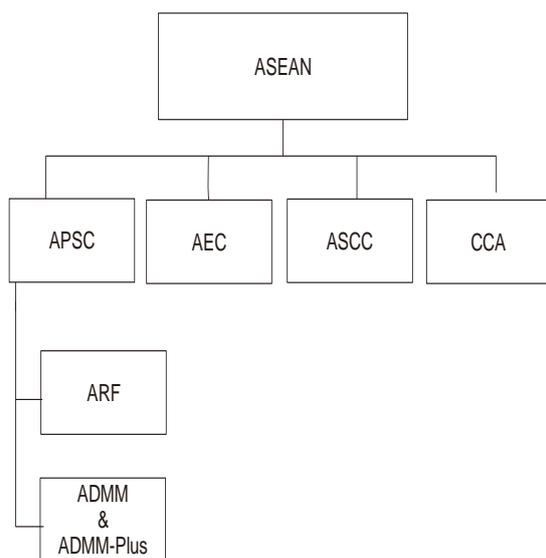
Untuk menjaga stabilitas pertahanan dan kemanan di kawasan Asia Tenggara diperlukan sebuah hubungan baik pada setiap anggotanya. Sebuah komunikasi yang rutin diagendakan dalam sebuah pertemuan dalam forum ASEAN sebagai bentuk upaya menjaga keselarasan antar anggota dengan munculnya sebuah kerjasama bilateral atau bahkan multilateral. Melalui bentuk kerjasama ini, diharapkan timbul rasa saling percaya antar negara anggota sebagai sebuah sikap menghindari mispersepsi, serta transparansi sehingga kerjasama yang dapat terjalin menjadi upaya pasti mencegah terjadinya konflik yang terbuka. Bentuk kerjasama sebagai hasil dari menjaga stabilitas supaya tidak rentan terjadinya konflik yang merugikan para anggota merupakan bentuk dari resolusi konflik yang ada di sebuah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Dari pengelolaan strategi dalam kerjasama antar negara tersebut diperlukan adanya interaksi yang berlandaskan pada rasa saling percaya antar negara anggota. Dengan terciptanya interaksi yang intensif dan transparan menjadikan

sebuah konsep Kebijakan CBMs dapat diimplementasikan sebagai bentuk kerjasama yang efektif dalam upaya pengelolaan resolusi konflik di ASEAN.

Proses resolusi konflik yang diperkenalkan dalam *First Meeting ASEAN Regional Forum (ARF)* dengan konsep Kebijakan *Confidence Building Measures (CBMs)* diselenggarakan di Bangkok 1994. Dengan menggunakan konsep CBMs sebagai bentuk upaya resolusi konflik di kawasan Asia Tenggara, diharapkan dapat memunculkan sebuah design berfikir baru bagi para anggota ASEAN dalam menjaga stabilitas di kawasan. CBMs untuk pertama kalinya diinisiasi ketika pembentukan ARF pada tahun 1994 dan hingga saat ini. Sasaran utama ARF dalam bentuk diplomasi pertahanan terwujud dalam sebuah forum pertahanan dan keamanan. ADMM merupakan sebuah forum terbuka bagi seluruh anggota ASEAN untuk melakukan sebuah interaksi, kerjasama dalam kaitan menjaga stabilitas pertahanan dan kemanan di kawasan Asia Tenggara. Forum ADMM berdiri pada tahun 2006 di Kuala Lumpur yang berisi seluruh menteri pertahanan maupun kepala angkatan bersenjata

setiap negara anggota. Kebutuhan akan sebuah stabilitas pertahanan kemandirian yang semakin meningkat, pada tahun 2010 di Vietnam, ADMM mengembangkan kerjasama dengan 8 negara mitra dalam forum ADMM-Plus.

Bagan 1. Struktur ASEAN Defence Ministers Meeting dan ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus dalam ASEAN



Sumber: Dokumen ASEAN: ASEAN Secretariat Organizational Structure Effective (ASEAN, ASEAN Secretariat Organizational Structure Effective)

Berdasarkan bagan 1. ADMM-Plus merupakan bagian dari ASEAN dan merupakan salah satu pengembangan pilar dari APSC, ADMM-Plus merupakan hasil dari ADMM yang dapat menjalin serta mempererat ikatan ASEAN dengan mitra-mitra keamanan ekstra-regional.

Hal ini sebagai wujud upaya ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara khususnya di era globalisasi yang mendorong kemajuan di setiap negara-negara yang ada.

ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus yaitu membangun rasa saling percaya, *preventive diplomacy*, dan *conflict resolution* (Luhulima, 1999). Melalui berbagai macam bentuk kerjasama yang terjalin antar negara anggota, dapat menumbuhkan keterbukaan serta membangun rasa saling percaya, transparansi dalam upaya penanganan konflik yang terjadi atau bahkan pencegahan dikemudian hari. Serta memfokuskan terkait upaya yang dilakukan ASEAN dalam meminimalisir konflik antar negara dengan melalui skema kebijakan CBMs sejak diinisiasinya konsep tersebut. Berbagai macam definisi kebijakan CBMs, berkembang di berbagai macam bentuk organisasi internasional. Khususnya ASEAN, CBMs didefinisikan sebagai “upaya untuk membuat jelas bagi negara yang bersangkutan, melalui penggunaan berbagai langkah dari kegiatan militer yang berpotensi mengancam”. Langkah-langkah membangun kepercayaan mencakup pada berbagai macam aspek,

mulai dari transparansi dan pertukaran informasi, pemberitahuan lanjutan tentang latihan militer serta pemantauan perjanjian senjata regional.

Dalam literatur mengenai CBMs menurut Amitav Acharya, CBMs membagi tindakan dalam 3 bagian yakni (Acharya A., 1997) Prinsip/tindakan deklarasi, merupakan pernyataan umum atas sebuah kepentingan, norma, dan keyakinan yang biasanya didukung oleh beberapa negara sebagai bentuk awal keterbukaan melakukan hubungan di antara mereka. Umum dilakukan seperti diplomasi preventif dan resolusi konflik; Tindakan transparansi, dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi tentang postur nasional, kemampuan, dan kebijakan negara di bidang militer yang terkait dengan tujuan mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman; dan Upaya pembatasan, upaya penghambatan dalam menentukan batas-batas yang disepakati bersama dan hubungan timbal balik pada kegiatan-kegiatan dari para pihak yang memiliki kepentingan militer, dan jika dibiarkan tidak akan meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata. Langkah-langkah tersebut berusaha untuk mencegah tindakan sepihak yang dapat memperburuk perselisihan yang ada, dan menciptakan kecurigaan di pihak lain.

Dengan melakukan kerjasama yang baik dengan mitra organisasi

diharapkan sebuah organisasi internasional ASEAN dapat efektif memperkuat stabilitas pertahanan dan kemanan dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Dari seluruh karakteristik yang dimiliki ASEAN, kesadaran akan pengelolaan strategi dalam sebuah organisasi demi tercapainya tujuan yang efektif. Dengan melakukan pertemuan rutin, diharapkan turut dapat membangun CBMs di Asia Tenggara. Hal ini di wujudkan dari setiap pertemuan yang menghasilkan kerjasama secara berkesinambungan dan berlanjutan di setiap negara dan ADMM-Plus menjadi forum diplomasi pertahanan yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membangun persepsi kepentingan bersama. Serta mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra atas kesepakatan anggota ASEAN.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data juga melalui jelajah internet, dukungan studi pustaka atau *library research* yang ada untuk menjelaskan data yang berhubungan mengenai peran *ASEAN Defence Minister Meeting Plus (ADMM) Plus*

sebagai forum diplomasi pertahanan ASEAN. Analisis data yang digunakan deskriptif eksplanatorif yaitu dengan menggambarkan secara objektif keadaan atau fakta-fakta yang aktual yang ada, menganalisis dan memberikan penjelasan hubungan antar variable berdasarkan teori dan fakta yang dijadikan dasar analisis kemudian menginterpretasikannya sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan. Atau dengan kata lain, bentuk penelitian yang deskriptif menggambarkan peran *ASEAN Defence Minister Meeting Plus* (ADMM Plus) sebagai forum diplomasi pertahanan di kawasan Asia dan negara mitra.

HASIL DAN ANALISIS

Pada ancaman keamanan tradisional, seperti *interstate war*, sebenarnya masih membayangi berbagai negara, terutama yang sampai saat ini belum mencapai solusi damai secara permanen. Konflik perbatasan, persengketaan wilayah maupun konflik lain yang timbul masih menjadi pemicu konflik yang seaktu-waktu dapat menimbulkan perang terbuka antara satu negara dengan yang lainnya. sehingga dari potensi perang ini yang dikhawatirkan akan muncul serta memberikan dampak kerugian yang

besar bagi negara yang bersengketa maupun bagi negara yang terlibat kepentingan lain di dalamnya. Oleh karena itu, hal ini dianggap penting oleh sebagian negara di dunia untuk menjaga kestabilan keamanan dari potensi *interstate war* melalui berbagai cara, dengan sebagaimana yang perlu dilakukan terhadap munculnya ancaman non-tradisional (Anonymous, Military-Confidence Building Measures).

Dalam pembahasan setiap isu-isu yang memungkinkan timbulnya sebuah konflik berkepanjangan, sebuah forum para menteri pertahanan (ADMM) dapat menyetujui atau menyepakati atas isu-isu yang akan dibahas pada setiap pertemuan serta memberikan arahan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengelolaan konflik. Dalam contoh kesepakatan bersama yang terbentuk dari ADMM, mengenai pentingnya kebebasan navigasi pada perairan regional yang sesuai dengan hukum internasional serta berkomitmen pada negara masing-masing untuk implementasi dari deklarasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) dan kedepannya akan mengadopsi kode *Conduct for South China Sea* (COC).

Pada tahun 2012, untuk menyikapi dari beragam perbedaan pandangan dalam mengatasi situasi di Laut China Selatan, pada tanggal 18-19 Juli 2012 pihak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan upaya pendekatan dan konsultasi intensif (*shuttle diplomacy*) dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disepakatinya ASEAN's *Six Point Principles on the South China Sea* pada tanggal 20 Juli 2012 (Kemlu). Dari dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip yaitu : a) *The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002)*; b) *The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011)*; c) *The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea*; d) *The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*; e) *The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties*; and f) *The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles*

of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dalam mengadopsi *code of conduct* (COC) untuk mengatasi permasalahan Laut China Selatan, ASEAN melalui forum ADMM-Plus melakukan berbagai upaya dari sisi diplomasi. Salah satunya arahan dalam bentuk diplomasi yang dimaksudkan untuk untuk menurunkan tensi di Laut Cina Selatan serta adanya program kerja (ASEAN, *Concept Paper for the Establishment of an ASEAN Defence Ministers' Meeting*. The ASEAN Security Community) dalam tiga tahun ADMM-Plus tahun 2011-2013 mengenai pembangunan jaringan pusat perdamaian yang disetujui oleh Indonesia dan mengembangkan mekanisme untuk kolaborasi industri pertahanan disetujui oleh Malaysia.

Pada pelaksanaan kerjasama forum yang ketiga diadakan di Phnom Penh, Kamboja pada Mei 2012. Pada pertemuan ini menginisiasi sebuah artikel yang mengulas frekuensi pertemuan forum kerjasama yang direkomendasikan untuk membuat pertemuan menjadi dua tahun sekali atau tiga tahun sekali dan membantu proses keputusan pertemuan yang akan

diadakan pada Juni 2012 sebagai pertemuan yang mengusung pendirian jaringan pusat perdamaian ASEAN yang berada di Indonesia tepatnya di Sentul Bogor. Pusat perdamaian ASEAN yang dimiliki Indonesia menjadi *Indonesia Peace and Security Centre* (IPSC) terbesar yang berkedudukan di Kawasan ASEAN.

IPSC sendiri merupakan wilayah terpadu yang digunakan sebagai area pengelolaan perdamaian, penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana, dan pelatihan pasukan siaga. Di Kawasan ini juga terdiri dari Pusat Pemeliharaan Perdamaian, Markas Pasukan Siaga, Pusat Pelatihan, penanggulangan terorisme, pusat pelatihan penanggulangan bencana, kampus Universitas Pertahanan, dan pusat olahraga militer. Pusat Perdamaian ASEAN ini sewaktu-waktu dapat digunakan dalam setiap pertemuan anggota dalam membahas isu-isu yang harus segera terselesaikan.

Pada pertemuan dari forum ADMM-Plus keempat diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada bulan Mei 2013. Hasil dari pertemuan ini mengadopsi inisiasi dari pembangunan program interaksi

pertahanan ASEAN dan kerangka bantuan logistik. Khususnya memfasilitasi anggota ASEAN dan juga melaksanakan pelatihan bersama sebagai upaya cepat tanggap pada setiap persoalan. Bahan logistik ini digunakan sebagai bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang menjadi salah satu program dari kerjasama forum ADMM-Plus terkait dengan *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR) (Anonymous, Penanganan Bencana Tingkatkan Pengetahuan Logistik Kemanusiaan).

Pertemuan forum bentukan ASEAN yang kelima diadakan di Naypyidaw, Myanmar pada Mei 2014. Hasil dari pertemuan ini mengadopsi program kerjasama ADMM-Plus selama tiga tahun yaitu periode tahun 2014-2016, salah satunya adalah pembangunan jaringan komunikasi secara langsung sebagai fasilitas jaringan permanen dan stabil bagi para menteri pertahanan ASEAN untuk digunakan sebagai koordinasi respon regional seperti gawat darurat dan krisis. Selain itu protokol tambahan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan untuk forum ADMM-Plus diratifikasi untuk meningkatkan dan menjelaskan mekanisme serta prosedur

yang ada. Hasil dari pertemuan kerjasama forum ADMM-Plus pada bulan Agustus di tahun yang sama berakhir pada perjanjian untuk meningkatkan kerjasama praktis antara militer-militer ASEAN untuk mencapai tingkat kepercayaan dan konfidensi lebih tinggi antara satu dan lainnya, serta untuk membentuk langkah praktis untuk menurunkan tensi di Laut Cina Selatan.

Pertemuan terbaru di Vientiane pada 26 Mei 2016, dilakukan para Menteri pertahanan ASEAN (RSIS). Kehadiran Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN dijadikan sebagai rangkaian acara salah satunya upacara penanaman pohon di Kaysone Phomvihane Akademi Pertahanan Nasional dan upacara pembukaan ADMM-Plus Galeri Foto di Museum Tentara Rakyat Laos. Sekretaris Jenderal Le Luong Minh, dalam pesannya pada kesempatan itu, mengatakan bahwa penyelenggaraan pertemuan ini merupakan tonggak sejarah dalam evolusi mekanisme kerjasama pertahanan tertinggi dalam ASEAN pada setiap pertemuan yang dilaksanakan. Dalam perundingan mengenai *cyber security* sebagai program kerja dengan target yang

hendak dicapai setiap negara anggota ASEAN dengan mengurangi implikasi dari kerugian yang akan di rasakan serta peningkatan keamanan *cyber* bagi negara-negara anggota (ASEAN, ADMM-Plus Concept Papers dan Cyber Security).

Dari setiap pertemuan yang dilakukan, diharapkan turut bisa membangun *confidence building measures* (CBMs) di kawasan Asia Tenggara. Hal ini di wujudkan dari setiap pertemuan yang menghasilkan kerjasama secara berkesinambungan dan berlanjut di setiap negara dan ADMM-Plus menjadi forum diplomasi pertahanan yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membangun persepsi kepentingan bersama. Serta mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra atas kesepakatan anggota ASEAN.

Pada awalnya kebijakan Transparansi CBMs dianggap tidak relevan digunakan pada sebuah komunitas dengan perbedaan identitas, karena konflik dengan kekerasan berlatar belakang sebuah nilai dan identitas, memiliki kecenderungan akan menjadi konflik dengan eskalasi yang tinggi. Para pengamat menilai konsep yang berkembang di Eropa ini tidak dapat beradaptasi dan diyakini oleh

negara di kawasan Asia, sehingga adanya perbandingan antara kawasan Asia dan Eropa menjadi tolak ukur dari berbagai tulisan mengenai CBMs. ASEAN sebagai organisasi di kawasan menerapkan kebijakan CBMs sebagai bentuk upaya resolusi konflik dengan berbagai metode nir kekerasan. Amitav Acharya melihat konsep CBMs di ASEAN menjadi sangat relevan digunakan dalam sebuah komunitas Asia Tenggara walaupun memiliki perbedaan karakteristik identitas di setiap negara Asia Tenggara. Karena karakteristik terbentuknya sebuah komunitas ASEAN atas kesadaran para pendirinya demi tercapai sebuah bentuk stabilitas keamanan dan pertahanan yang diikuti oleh seluruh negara anggota. ASEAN memiliki forum regional yang berjalan secara periodik untuk melakukan kegiatan kerjasama dan komunikasi tentang informasi regional dan domestik setiap negara. Pembentukan Forum Regional ASEAN (ARF), forum antar-pemerintah pertama di kawasan mengenai kerjasama keamanan regional di Asia Pasifik juga telah menekankan kebijakan Transparansi CBMs sebagai langkah pertama menuju langkah-langkah peningkatan keamanan yang lebih

terperinci, seperti diplomasi preventif dan konflik resolusi.

Berbagai macam definisi dari kebijakan CBM, berkembang di berbagai macam bentuk organisasi internasional. Khususnya ASEAN, CBM didefinisikan sebagai upaya untuk membuat jelas bagi negara yang bersangkutan, melalui penggunaan berbagai langkah, sifat sebenarnya dari kegiatan militer yang berpotensi mengancam." Langkah-langkah membangun kepercayaan mencakup berbagai macam item, mulai dari transparansi dan pertukaran informasi, pemberitahuan lanjutan tentang latihan militer dan pemantauan perjanjian senjata regional. Tujuan strategis utama CBM adalah untuk mengurangi ketidakpastian strategis di kawasan Asia Tenggara. Tujuan bersama yang mendasari sebagian besar membangun kepercayaan antar negara dengan mengurangi ketegangan dan kecurigaan; mengurangi risiko perang karena kecelakaan atau salah perhitungan; membina komunikasi dan kerja sama dengan cara yang membantu untuk tidak menekankan penggunaan kekuatan militer; membawa pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan prioritas

pertahanan satu sama lain; dan mengembangkan rasa percaya diri strategis yang lebih besar di wilayah tersebut.

Kebijakan transparansi CBMs sebagai sebuah keadaan atau situasi yang ada di ASEAN sebagai bentuk resolusi konflik di ASEAN. Konsep CBMs ditopang oleh empat faktor pendukung sebagai aspek yang mendukung konsep CBMs berjalan dan diimplementasikan di setiap negara dan organisasi ASEAN. Dari keempat faktor pendukung tersebut yakni a) *Communication measures*, merujuk pada sebuah pembangunan saluran komunikasi secara langsung antar dua negara atau lebih yang terlibat dalam konflik serta komitmen melaksanakan CBMs melalui pernyataan langsung dalam sebuah forum internasional melalui perwakilan negara. Keterbukaan komunikasi ini memungkinkan perwakilan negara dapat bersama-sama meminimalisir mispersepsi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas, b) *Constraint measures*, berkenaan dengan aturan pergelaran kekuatan militer oleh satu pihak dalam rentang jarak yang telah disepakati bersama tentang *demilitarized zone*. Dengan tujuan membuat basis militer yang

bersifat netral dalam penerapan CBMs, c) *Transparency measures*, mengatur tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin terciptanya transparansi militer antar pihak, khususnya dalam aspek *military capability* dan *military operation*. d) *Verification measures*, bentuk tindakan yang bertujuan memverifikasi kepatuhan yang tertuang dalam skema CBMs dan dilakukan oleh kedua pihak ataupun pihak ketiga. Bentuknya dapat berupa inspeksi kekuatan militer untuk mengkonfirmasi informasi yang telah disampaikan pada faktor *transparency measures*.

Dari faktor-faktor tersebut, dapat diartikan bahwa konsep CBMs ditopang oleh keempat aspek pendukung yang dianalogikan sebagai pilar-pilar. Dari keempat faktor tersebut implementasi dari konsep CBMs dapat dilihat sebagai sebuah hasil dari keseluruhan aspek yang mendukung konsep tersebut. Upaya dalam penanggulangan permasalahan yang terjadi dalam kawasan ASEAN turut diselesaikan oleh *ASEAN Regional Forum* (ARF) melalui program-program *Confidence Building Measures* (CBMs) dan *Preventive Diplomacy* (PD), ini dapat berperan baik untuk mengurangi

ketegangan seperti di Laut Cina Selatan dengan mendorong kerjasama antara pihak yang terlibat, untuk mengupayakan cara-cara yang damai dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan perbatasan di kawasan ASEAN maupun permasalahan pertahanan dan keamanan lainnya. Model penanganan konflik melalui konsep CBMs ini mengupayakan penggunaan resolusi konflik tanpa melalui kekerasan. Hal ini memungkinkan tidak terjadinya *violence* terutamanya disebabkan oleh kultur yang berbeda antara negara ASEAN dan negara maju lainnya.

Wujud nyata yang terlaksana melalui faktor pendukung sebagai indikator dari berjalannya konsep CBMs di ASEAN dengan kerjasama CBMs, dimana keterbukaan yang terjalin ialah dalam menguraikan informasi dan *new report* antar kawasan. Baik bertukar informasi, menjalinkomunikasi, pemberitahuan mengenai aktivitas militer, dan pemberian izin untuk saling melakukan observasi dan pelatihan-pelatihan dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. Dalam pertemuan ADMM-Plus kelima di Naypyidaw, Myanmar pada Mei 2014. Pada

pertemuan ini mengadopsi program kerja ADMM-Plus selama tiga tahun periode tahun 2014-2016, salah satunya adalah pembangunan jaringan komunikasi secara langsung sebagai fasilitas jaringan permanen dan stabil bagi para menteri pertahanan ASEAN untuk digunakan sebagai koordinasi atas respon regional seperti gawat darurat dan krisis. Hasil pertemuan ADMM-Plus bulan Agustus di tahun yang sama berakhir pada perjanjian untuk meningkatkan kerjasama praktis antara militer-militer ASEAN untuk mencapai tingkat kepercayaan dan konfidensi lebih tinggi satu dan lainnya. Perlunya transparansi dalam tukar menukar informasi tentang kerjasama pengelolaan anggaran dan aktivitas militer sebagai penunjang dapat berjalannya kerjasama CBMs ini.

Pengembangan hubungan diplomasi yang baik dalam hal confidence building measures akan menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai antar pihak. Secara praktis, diplomasi pertahanan dalam tatanan confidence building measures dilakukan dalam hal kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan,

deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, latihan militer bersama. (Gilang, 2016)

Pengelolaan strategi dalam bentuk kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral diperlukan adanya sebuah bentuk interaksi yang berlandaskan pada rasa saling percaya antar negara. Dengan terjalinnya interaksi yang intensif serta transparan antar negara anggota ASEAN maupun mitra ASEAN menjadikan sebuah konsep CBMs dapat diimplementasikan sebagai bentuk kerjasama yang efektif dalam upaya pengelolaan resolusi konflik di ASEAN. Berbagai macam definisi CBMs, berkembang di berbagai macam bentuk organisasi internasional. Khususnya ASEAN, CBMs didefinisikan sebagai "upaya untuk membuat jelas bagi negara yang bersangkutan, melalui penggunaan berbagai langkah dari kegiatan militer yang berpotensi mengancam". Langkah-langkah membangun kepercayaan mencakup pada berbagai macam aspek, mulai dari transparansi dan pertukaran informasi, pemberitahuan lanjutan tentang latihan militer serta pemantauan perjanjian senjata regional.

ASEAN dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan konsep *Confidence Building Measures* (CBMs) sebagai upaya mencegah terjadinya konflik dan meluasnya sebuah konflik yang terjadi. Dari sebuah konsep CBMs secara efektif dapat diterapkan di ASEAN kepada negara anggota, untuk bersama-sama menciptakan iklim perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Melalui bentuk kerjasama yang terjalin antar negara, serta interaksi komunikasi yang terbentuk melalui berbagai forum ataupun saluran langsung antar negara, serta bentuk transparansi dari berbagai aspek yang ada dalam konsep CBMs. Menjadikan sebuah konsep CBMs efektif dalam instrument resolusi konflik di ASEAN.

KESIMPULAN

Beberapa bentuk kerjasama yang terjalin dalam sebuah Organisasi internasional seperti ASEAN diharapkan tidak hanya merupakan bentuk *hagemony* salah satu negara anggota maupun mitra. Keselarasan dalam sebuah kerjasama yang terjalin tentu terdapat sebuah perbedaan yang mencolok antar negara. Klasifikasi antara negara berkembang dan negara maju di kawasan Asia sangat berdampak pula pada bentuk kerjasama

yang terjalin, dimana negara maju akan mendapatkan porsi lebih banyak, mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki setiap negara berbeda. Untuk itu diperlukannya sebuah ketegasan setiap negara dalam pengawasan yang seimbang seperti pada prinsip ASEAN dalam kerangka kerja dalam menjalin kerjasama seperti yang terdapat pada prinsip ASEAN Way. Keberhasilan ASEAN dalam menerapkan konsep CBMs sebagai upaya resolusi konflik dalam mencegah terjadinya konflik tidak semata dalam konteks pertahanan kemandirian. Penanganan konflik yang dilakukan ASEAN diharapkan menjalar pada aspek-aspek utama lainnya seperti ekonomi, hak asasi manusia, politik serta budaya. Aspek-aspek tersebut merupakan tonggak utama terjadinya konflik mencuat ke permukaan hingga eskalasi konflik yang tidak diinginkan. Untuk itu pengelolaan konflik, pencegahan konflik, serta transformasi konflik menjadi hal yang niscaya kedepannya sebagai sebuah acuan pengembangan stabilitas ASEAN keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A. (1997). *Draft Report : PWGSC.*

Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power.* New York: Routledge.

Acharya, A. K. (2007). *Ethnic Conflict and Refugee in Sri Lanka. Revista de Antropologia Experimental.*

Gilang, H. (2016). PERAN ASEAN DEFENCE MINISTERS MEETING PLUS (ADMM PLUS) SEBAGAI FORUM DIPLOMASI PERTAHANAN DI KAWASAN ASIA. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, Vol 8, No 2, Hal 1-18.

Kemlu. (n.d.). *Konflik Laut China Selatan.* Retrieved Desember 06, 2018, from <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx>

Kumar, P. (2018, Maret 18). *Potentials, Challenges and Opportunities for Tourism Development in the Eastern Province Sri Lanka. Journal of Tourism and Hospitality.*

Luhulima, C. (1999). *Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy in Southeast Asia. Diklat Caraka Utama.* Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional.* In J. Walhker.

- Narayana, N. (2008, Januari 8).
Chronology-Attacks blamed on Sri Lanka's Tamil Tigers. (S. Gardner, Ed.) Retrieved Februari 1, 2019, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/idUSCOL66488>
- Rothenberg, D. M. (1998). Negotiation and the Dispute Resolution in the Sri Lankan Context: Lesson From the 1994-1995 Peace Talks. *Fordham International Law Journal*, 22(2).
- RSIS. (n.d.). *The Future Of The Admm/Admm-Plus And Defence Diplomacy In The Asia Pacific*. Retrieved Agustus 15, 2018, from http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/01/ER160125_RSAP-Roundtableon-Future-of-ADMM.pdf
- Rudy, T. M. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.